

Pancasila
sebagai Orientasi
Kegiatan Keilmuan
(sebuah refleksi awal)

■ Djoko Pitoyo

Pada jaman Yunani Kuno 'ilmu pengetahuan', yang oleh Aristoteles disebut dengan *theoria*, diusahakan dengan tanpa pamrih. Dengan *theoria*, manusia tidak berpretensi memanipulasi dan menguasai alam-kodrat untuk kepentingan hidupnya. Apa yang diinginkan dalam mengusahakan *theoria* tidak lain kecuali untuk memahami hakikat semesta dan mengerti hakikat manusia dan posisinya dalam keseluruhan kosmos. Kondisi semacam ini berlangsung hingga pada Abad Pertengahan bahkan hingga awal masa Renaissance.

Dari masa *Renaissance* kemudian melewati *Aufklärung* hingga sekarang ini, kita tidak dapat mengelak, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai anak kandungnya, telah merambah, menyusup dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Pengaruh itu bukan saja terhadap kelompok manusia tertentu saja, melainkan hampir seluruh umat manusia, tidak terkecuali manusia Indonesia (Koento Wibisono, 1986; 32-35). Secara jujur harus diakui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak menyumbangkan kemudahan-kemudahan dan kenyamanan-kenyamanan kepada manusia. Akan tetapi di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendatangkan ancaman-ancaman kepada umat manusia: peperangan dengan senjata-senjata yang dahsyat, pencemaran lingkungan, manipulasi genetika, dan masih banyak lagi (lihat Jacob, 1988; 19-32). Lebih dari itu, iptek dengan industrialisasi sebagai realisasi dirinya juga membawa dampak kebudayaan yang amat besar; bukan saja yang memuliakan manusia, melainkan juga yang berakibat merendahkan kemanusiaan (lihat Mangunwijaya, 1985). Keadaan semacam ini mau tidak mau mengundang keprihatinan banyak pihak, di antaranya tentu saja para ilmuwan itu sendiri.

Diskusi dan perdebatan telah banyak dilakukan di sekitar permasalahan ilmu pengetahuan, terutama menyangkut anggapan-anggapan dasar tiap ilmu, metode-metode yang dipergunakan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi etikanya. Orang sering menganggap bahwa seakan-akan ilmu itu "berjalan dengan sendirinya", sebagai entitas yang independen; sementara para ilmunannya seakan-akan dianggap sekadar "operator" yang setia mengabdikan kepada ilmu dengan *credo* mencari kebenaran. Dan ketika ilmu bukan hanya terlahir oleh keingintahuan manusia, melainkan juga

untuk melayani kepentingan manusia, maka di situlah orang harus sadar bahwa ilmu tidaklah lepas dari kepentingan-kepentingan.

Jürgen Habermas, ketika menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Universitas Frankfurt telah mengoreksi secara telak anggapan naif itu. Dalam pidato yang diberi judul *Erkenntnis und Interesse* itu dia mengajukan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan, bahwa sejak permulaannya ilmu-ilmu itu telah dimasuki kepentingan-kepentingan. Ilmu-ilmu yang empiris-analitis telah disusupi kepentingan teknis, ilmu-ilmu historis-hermeneutis telah dimasuki kepentingan praktis, dan ilmu-ilmu yang berorientasi kritis telah dimasuki kepentingan emansipatoris (Habermas, 1990; 154-180). Memang, manusia tidak mungkin hidup secara lepas dari nilai-nilai tertentu yang dipegangnya. Konsekuensinya, si ilmuwan sebagai manusia tentulah memegang nilai-nilai tertentu yang diyakininya. Pegangan nilai-nilai itu, disadari atau tidak, tentu akan mewarnai kegiatan keilmuannya, baik ketika ia membuat asumsi-asumsi, menggunakan metode-metode maupun ketika menerapkan ilmu itu dalam kehidupan konkrit. Itu menunjukkan bahwa ilmu tidak pernah otonom dalam arti semurni-murninya (lihat Koento Wibisono, 1986; 38-39; Bakker, 1987; 73-74).

Pokok-Pokok Masalah

Kalau ilmu tidak pernah otonom dalam arti semurni-murninya, dan apabila para ilmuwan dianggap memegang nilai-nilai tertentu, sedangkan setiap ilmuwan tentu hidup dalam suatu lingkup budaya tertentu, maka kegiatan perusahaan ilmu tentu tidak pernah bisa menghindarkan diri dari konteks budaya tertentu. Perusahaan ilmu di Indonesia yang masih relatif pendek dibanding kawasan Eropa dan Amerika Utara, mengesankan terjadi "begitu saja". Ilmu-ilmu yang dikembangkan, yang *nota bene* hampir sebagian besar dari Barat, seakan-akan dipungut begitu saja sebagaimana adanya. Dari sinilah muncul sejumlah permasalahan.

Pertama, apakah setiap perusahaan ilmu di Indonesia telah diberi pertanggungjawaban perihal asumsi-asumsi dasarnya, pencapaian dan batas-batasnya, serta implikasi-implikasi etisnya? Persoalan ini akan menggiring orang untuk menelaah landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis bagi

ilmu-ilmu, karena pada dasarnya setiap bentuk buah pikiran manusia dapat dilacak-balik pada dasar-dasar itu (Jujun Suriasumantri, 1982; 5).

Kedua, karena ilmu pengetahuan diusahakan oleh manusia dan pada babak terakhir juga diperuntukkan bagi (kepentingan) manusia, maka dasar-dasar ontologis, epistemologis dan aksiologisnya menuntut seperangkat sistem nilai yang manusiawi. Prinsip kemanusiaan sendiri dianggap universal, akan tetapi konsep tentang kemanusiaan pada kenyataannya dipengaruhi oleh sistem sosio-budaya tertentu. Dalam konteks Indonesia, sistem nilai sosio-budaya yang telah disepakati sebagai *Weltanschauung* adalah sistem nilai yang terkristal dalam Pancasila. Persoalannya: Mampukah Pancasila sebagai suatu sistem nilai memberikan dasar atau orientasi bagi kegiatan perusahaan ilmu?

Ketiga, karena Pancasila secara formal harafiah hanya merupakan rumusan yang terdiri dari 26 kata, lalu bagaimana ia dapat memberikan 'arahan' terhadap kegiatan keilmuan? Lebih tajam lagi, bagaimana Pancasila memetakan ilmu-ilmu beserta batas-batas kewenangannya serta implikasi-implikasi etisnya?

Menghadapi masalah-masalah seperti telah dirumuskan tadi, mau tidak mau kita akan digiring ke dalam kancah kefilsafatan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Pendekatan ini mengandaikan dilakukannya upaya-upaya refleksif-spekulatif. Karena pokok-soal yang dibahas berkisar pada kaitan Pancasila dengan ilmu, maka refleksi dijalankan dengan 'jalur-jalur' hermeneutika filsafati dengan penjelajahan melingkar dari ilmu ke Pancasila dan secara simultan juga dari Pancasila ke ilmu.

Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembahasan

Melihat permasalahan dan bidang garapannya, orang dapat memandang Pancasila terlebih dahulu. Bicara soal Pancasila, maka ada dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu *pertama* mengembangkan suatu teori ilmiah untuk mempelajari Pancasila; dan *kedua* mengembangkan teori-teori ilmiah dengan Pancasila sebagai landasannya (Pranarka, 1985; 377). Dengan perkataan lain, orang memandang Pancasila sebagai *genetivus objectivus* di satu pihak, dan memandang

Pancasila sebagai *genetivus subjectivus* di lain pihak. Yang pertama mengandaikan Pancasila sebagai objek yang dikaji, sedangkan yang kedua mengandaikan Pancasila sebagai subjek yang (dipakai sebagai dasar untuk) mengkaji (Soejadi dan Koento Wibisono, 1986; 17).

Dalam karangan ini Pancasila tidak dipandang dari satu dimensi dengan mengeksklusikan dimensi lainnya, melainkan keduanya diletakkan dalam proporsi yang saling mengandaikan, meskipun pada akhirnya Pancasila akan dipandang sebagai *genetivus subjectivus*. Dalam refleksi awal, Pancasila akan digali isi-kandungannya (sebagai objek) dalam rangka eksplisitasi nilai-nilai dan pandangan-pandangan dasarnya tentang realitas. Dengan demikian, akan dapat dirumuskan sosok Pancasila sebagai subjek dalam rangka mendasari dan memetakan ilmu-ilmu serta memberi pertanggungjawaban etisnya.

Refleksi dan spekulasi filosofis yang dilaksanakan diarahkan untuk menghasilkan suatu konstruksi pikiran yang mampu mewadahi kegiatan keilmuan secara umum. Tegasnya, akan disusun suatu kerangka dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis bagi kegiatan keilmuan atas dasar kerangka filsafat Pancasila. Meskipun kerangka dasarnya filsafat Pancasila, bukan berarti seakan-akan filsafat Pancasila dipancangkan pada posisi yang eksklusif di antara sistem-sistem atau pemikiran-pemikiran filsafat lainnya, melainkan sambil berefleksi, filsafat Pancasila didialogkan dengan sistem-sistem filsafat yang lain, bahkan dari dialog itu tidak tertutup kemungkinan terdapat aspek-aspek tertentu dari sistem-sistem filsafat rekan dialog itu yang dapat diadopsi untuk diinkorporasikan ke dalam sistem filsafat Pancasila demi pengkayaan filsafat Pancasila sendiri.

Pemaparan kajian ini tidak ditempuh dengan cara membeberkan dulu filsafat Pancasila secara tersendiri baru kemudian disusul dengan refleksi ontologis, epistemologis dan aksiologis bagi pendasaran kegiatan keilmuan, melainkan ditempuh cara "sekaligus" memperbincangkan ketiga dasar keilmuan itu dengan Pancasila sebagai kerangka dan pemandunya. Maka, lembar-lembar berikut akan berisi kupasan ontologis, epistemologis dan aksiologis dengan Pancasila diandaikan telah berada di dalamnya sebagai sumber dan sekaligus sasaran kajian

Refleksi ontologis

Refleksi harus dimulai dari dan dalam Pancasila itu sendiri menurut isi kandungannya. Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* menunjukkan pengakuan adanya Tuhan. Tuhan bukan saja diakui sebagai realitas, melainkan sekaligus mendasari (seluruh) realitas. Dari pada-Nya berasal dan kepada-Nya kembali segala sesuatu. Ia Maha Sempurna dengan sifat-sifat-Nya. Sila *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab* menunjuk adanya pengakuan atas eksistensi manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Predikat adil dan beradab dalam sila II itu mengandaikan bahwa manusia berkoeksistensi dengan pihak lain. Pengertian adil menyaratkan adanya pihak-pihak, sedangkan beradab berarti menuntut syarat proses pergaulan hidup dalam komunitas tertentu. Jadi, manusia sebagai manusia tidak pernah “seorang diri”, melainkan “bersama pihak lain”. Pihak lain di sini dapat digolongkan pertama-tama ke dalam tiga kategori: sesama manusia, diri sendiri dan Tuhan.

Sesama manusia sebagai pihak, juga tercermin dalam sila III, IV dan V. *Persatuan Indonesia* yang salah satu isi kandungannya adalah *nation*, mengandaikan adanya sekelompok manusia yang hidup bersama dalam satu ikatan tertentu. Begitu juga dalam pengertian kerakyatan dalam sila *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, terkandung di dalamnya unsur pokok rakyat, yaitu manusia-manusia sebagai subjek pendukung adanya negara. Kemudian, pada sila *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* yang berisi nilai keadilan sosial, tak pelak lagi juga mengandaikan adanya manusia-manusia yang hidup bersama dalam suasana saling membutuhkan, menerima dan memberi. Jadi, sila II, III, IV dan V, kesemuanya mengandaikan adanya pihak “sesama manusia”. Hanya harus dicatat, bahwa pengertian “sesama” pada sila II bersifat universal, sedangkan tiga sila berikutnya lebih bersifat kolektif (bangsa Indonesia, rakyat Indonesia).

Hingga di sini seakan-akan ada kesan bahwa secara harafiah Pancasila hanya mengakui keberadaan Tuhan dan manusia. Akan tetapi, bila kita kuak yang tersirat, maka akan kita temukan bahwa Pancasila bukan hanya mengakui dua keberadaan itu. Marilah kita cermati lagi sila I dan II. Tuhan dapat ‘ditangkap’ manusia oleh karena Tuhan bukanlah “yang

asing". Lewat ciptaan-ciptaan-Nya manusia mempunyai 'media' untuk 'menangkap'-Nya. Manusia sendiri adalah bagian dari ciptaan-Nya. Dan manusia yang otentik adalah manusia yang mendiami dunia; dunia ajang hidup, *Lebenswelt*. Manusia 'menemukan' diri sepenuh-penuhnya justru ketika ia sadar bahwa ia makhluk yang *mendunia*. Dan berbeda dengan makhluk lain yang hidup di dunia secara alamiah dan terkungkung oleh *Umwelt*-nya, manusia *mengalami* dunia. Jadi, ada satu prasyarat bagi eksistensi manusia, yaitu dunia.

Berbicara masalah dunia, orang dapat mendiskusikannya hingga panjang lebar, bahkan berlarut-larut. Tetapi pemahaman akan dunia pada babak yang paling elementer, dengan hanya memakai sarana *commonsense* saja, maka segera terhampar di hadapan kita -- sebagaimana kita 'alami' -- bahwa dunia terdiri dari anekarupa anasir. Ilmu kimia, fisika dan biologi telah mengidentifikasi hal ini secara lebih rinci. Tetapi apakah dalam hidup konkrit manusia, ia mengalaminya sedemikian rumit? Pada babak pemahaman pertama, orang akan lebih mudah menggolong-golongkan isi dunia dalam garis besar: benda-benda tak hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia sendiri. Dengan demikian, sila I dan II bukan hanya menunjuk pengakuan atas Tuhan dan manusia saja, melainkan juga binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak-hidup.

Sekarang tiba gilirannya untuk mencermati lagi sila III, IV dan V. Pada alinea-alinea terdahulu telah diungkapkan, bahwa ketiga sila itu mengandaikan adanya manusia, khususnya dalam sosialitasnya. Akan tetapi, gagasan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial yang terdapat di dalamnya bukanlah digambarkan di negeri antah-berantah. Dengan perkataan lain, ketiga hal tadi bukan hanya dimengerti *in abstracto* belaka, melainkan sekaligus *in concreto*. Maka bangsa dan rakyat yang konkrit menunjuk adanya sekumpulan manusia yang menginjak bumi, menghirup udara, meneguk air, memakan tanaman/hewan dan apa-apa yang dihasilkannya. Keadilan sosial yang nyata juga mengandaikan keterlibatan benda tak-hidup, tumbuh-tumbuhan serta hewan dan hasilnya sebagai media ekspresi keadilan sosial. Untuk sementara, dapat dikatakan bahwa Pancasila, pada tataran empirik, mengakui pluralitas "ada" secara ontologis. Apakah ini pandangan ontologis Pancasila secara definitif? Refleksi masih di tengah

jalan; dan masih harus dilanjutkan.

Kembali ke manusia sebagai sentral refleksi, dan sekaligus pelaku refleksi. Dari kenyataan empirik tadi, dapat kiranya dibuat penjenjangan berdasarkan hubungan manusia dengan segenap keberadaan. Secara vertikal, manusia berhubungan dengan Khaliknya, Tuhan. Secara horisontal, manusia berhubungan dengan sesamanya termasuk dirinya sendiri. Sedangkan ke 'bawah', manusia berhubungan dengan "alam dunia" atau dunia infrahuman, baik yang organik maupun yang anorganik -- binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak-hidup/non-hayati. Apabila pola hubungan semacam ini diterima, maka itu berarti diandaikan bahwa realitas itu berjenjang-jenjang. Adapun jenjangnya ialah, Tuhan menempati jenjang tertinggi dan sekaligus mendasari segenap unsur realitas; kemudian berturut-turut manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak-hidup (lihat skema A).

Timbul persoalan, sebagaimana telah muncul di sepanjang sejarah filsafat, apakah dasar pokok kenyataan: materi atau ruh? Implikasi persoalan itu juga menelorkan persoalan lebih lanjut tentang hakikat manusia: jiwa atau badan/raga? Bagaimana Pancasila menjawab tantangan ini? Kalau kita renungkan kembali berdasarkan pemaparan pada taraf empirik di alinea-alinea terdahulu, maka segera tampak, bahwa Pancasila tidak hanya mengakui materi/badan saja, pun pula tidak hanya mengakui ruh/jiwa saja. Kalau kita lihat penjenjangan tadi, ternyata bahwa kedua-duanya ada. Hanya harus dicermati, agar pemahaman tentang hal itu menjadi lebih jernih.

Notonagoro mencoba merefleksikan kenyataan menurut Pancasila bercorak mono-dualis dan dalam tataran yang lebih kompleks: monopluralis. Refleksinya dimulai dari manusia. Manusia, menurut Notonagoro, dapat dimengerti dari susunan kodratnya (jiwa-badan), sifat kodratnya (makhluk individu-sosial) dan kedudukan kodratnya (pribadi mandiri-makhluk Tuhan). Manusia sebagai "miniatur" alam semesta (mikrokosmos), mencerminkan keadaan alam semesta yang sesungguhnya (makrokosmos) (Notonagoro, 1980). Pandangan yang kurang lebih senada disampaikan oleh Soerjanto. Dengan bertolak dari pemikiran Drijarkara, Soerjanto mengatakan bahwa Pancasila merupakan eksplisitasi pribadi manusia

sebagai *totalitas* yang mengandung berbagai antinomi dalam dirinya, yaitu antara individualitas dan sosialitas, materialitas dan spiritualitas, transendensi dan imanensi, eksteriorisasi dan interiorisasi; yang kesemuanya itu tidak dilihat secara sektoral dalam salah satu aspek kehidupannya, tetapi secara integral (Soerjanto, 1989; 55-56).

Kedua pandangan tadi membantu pemahaman kita bahwa dalam sistem Filsafat Pancasila tidak terdapat pengutamaan materi atau ruh. Kedua-duanya diakui sebagai kenyataan. Akan tetapi bagaimana keduanya “hadir” pada setiap hal? Inilah yang tampaknya belum terselesaikan. Di sini akan dicoba untuk menghadapi persoalan itu. Kalau kita tetapkan penjenjangan tadi (Tuhan, Manusia, Hewan, Tumbuh-tumbuhan, Benda-benda tak hidup), maka persoalan materi dan ruh dapat di-”tata”. Pada jenjang tertinggi (Tuhan), ruh mutlak, sedangkan pada jenjang terendah (benda tak-hidup) materi dominan. Jadi kalau dilacak dari Tuhan, maka kedudukan ruhani mutlak, kemudian pada manusia semakin berkurang, pada hewan makin berkurang lagi, pada tumbuh-tumbuhan kian miskin, dan pada benda-benda tak-hidup menjadi kempis. Kalau kita lacak dari ‘bawah’ (benda tak-hidup) materi begitu dominan, kemudian berturut-turut tumbuh-tumbuhan sudah berkurang, pada binatang makin berkurang, pada manusia dominasinya makin berkurang lagi, dan pada Tuhan makin kempis.

Pandangan ontologis semacam ini tentu mengimplikasikan pendirian epistemologis; atau dengan perkataan lain, ini mengandung konsekuensi epistemologis tertentu (masih akan diuraikan lebih lanjut). Yang harus dieksplisitkan sekarang ialah, dasar ontologis Pancasila bagi ilmu. Ilmu, sebagai kegiatan manusiawi, dapat diarahkan untuk menguak segenap realitas sebagaimana dijenjangkan tadi (Tuhan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak-hidup). Akan tetapi harus disadari, bahwa setiap jenjang mempunyai sifat-sifatnya yang khas. Oleh karena itu, pendekatan yang dipergunakan harus disesuaikan dengan sasaran kajian. Penyamarataan pendekatan (dan metode) tentu akan mengakibatkan bias-bias yang mengacaukan.

Refleksi Epistemologis

Telah dipaparkan, bahwa terdapat suatu pola/tata

hubungan antara manusia dan segenap isi realitas. Suatu hubungan, apalagi kalau manusia terlibat di dalamnya, selalu mengandaikan adanya pengenalan antarpihak yang saling berhubungan itu. Maka, refleksi berikut ini berkisar tentang “teori pengenalan/pengetahuan” yang dalam khasanah filsafat lazim disebut epistemologi.

Sesungguhnya antara ontologi dan epistemologi saling mengandaikan satu sama lain. Sejak refleksi ontologis dilaksanakan, epistemologi telah terandaikan di dalamnya. Kini, ketika kita harus memasuki kawasan epistemologi, sudah barang tentu bertaut erat dengan ontologi. Maka, sesuai dengan refleksi ontologis yang telah dipaparkan di muka, pengenalan atau pengetahuan manusia dapat dilacak ke tiga arah: terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia (baik individualitas maupun sosialitasnya) dan terhadap dunia infra-human (benda-benda tak-hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan dalam batas-batas tertentu juga manusia sejauh dilihat dimensi raganya). Dengan demikian, manusia dapat megenal tiga jenjang “dunia”, yaitu “dunia infra-human”, “dunia human”, dan “dunia supra-human” atau “dunia supra-natural” atau “dunia illahiah”. Tentu saja masing-masing dengan sifat, cara (metode), dan hasil pengetahuan yang berbeda-beda.

Terhadap dunia infra human, pengenalan atau pengetahuan manusia bersifat *knowing*. Terhadap dunia human, pengenalan atau pengetahuan manusia bersifat *understanding*. Sedangkan pengenalan atau pengetahuan manusia terhadap dunia Illahiah bersifat *believing*. Itu semua bisa dicapai manusia lewat sarana-sarana yang secara kodrati dimiliki oleh manusia, yaitu sarana inderawi, akal, dan intuisi. Masing-masing kemampuan itu memiliki keabsahan dan akurasi sendiri-sendiri tergantung kadar pengetahuan dan objek kajiannya.

Pengenalan/Pengetahuan Manusia terhadap Dunia Infrahuman

Objek material pengetahuan manusia terhadap dunia infra-human mencakup hal-hal yang bersifat fisik-kealaman. Apabila pengetahuan tentang objek-objek itu bersifat ilmiah, maka ilmu-ilmu yang mengkajinya dikelompokkan ke dalam *Naturwissenschaften* (Rickert dan Dilthey). Ilmu-ilmu ini

berwatak *nomotetik* (Windelband). Metode-metode yang digunakan lebih kuantitatif. Dan pada babak terakhir ilmu-ilmu dalam kelompok ini berambisi menemukan keajaiban-keajaiban yang niscaya: *Natural laws*. Asumsi dasarnya ialah bahwa kodrat alam bersifat konstan dan stabil: *prinsipium constantiae et stabilitatis naturae* (Pranarka, 1987: 86). Asumsi dasar yang lain ialah bahwa objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya; pun pula tiap-tiap gejala bukan dianggap sebagai sesuatu yang kebetulan belaka, melainkan ada penyebabnya (Jujun Suriasumantri, 1982: 7-8).

Dengan asumsi-asumsi semacam itu, hukum sebab-akibat dianggap berlaku hampir mutlak bagi gejala-gejala dunia infra-human. Meskipun demikian, apabila dicermati secara lebih saksama, hukum sebab-akibat memang dapat secara eksak berlaku bagi benda-benda tak-hidup, tetapi bila sudah menyangkut tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi raga manusia, toh tampak semakin relatif. Mengapa demikian? Karena variabel tumbuh-tumbuhan lebih banyak daripada benda-benda tak-hidup, binatang lebih kaya variabelnya ketimbang tumbuh-tumbuhan, dan raga manusia jauh lebih kaya dan lebih rumit variabelnya daripada ketiganya.

Pengenalan/Pengetahuan Manusia terhadap Dunia Human

Objek material pengenalan atau pengetahuan manusia terhadap dunia human menyangkut segi-segi kehidupan manusia (di bidang ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, kefilosofatan) yang apabila dilacak pada titik yang paling ultim merupakan ekspresi kejiwaan manusia. Pada kawasan ini variabel-variabel semakin kaya dan kompleks. Di sini yang digarap bukan hanya deretan fakta-fakta, melainkan sudah memasuki kawasan makna. Positivisme bersikeras bahwa kawasan inipun dapat digarap dengan cara sebagaimana menggarap objek-objek fisik-kealaman. Akan tetapi banyak pula pendirian yang menentangnya, umpamanya -- untuk menyebut beberapa -- fenomenologi, historisisme. Bagaimana Pancasila memetakan kelompok ilmu-ilmu ini?

Berdasarkan pandangan ontologinya, maka ilmu-ilmu ini dapat dikelompokkan ke dalam *Kulturwissenschaften* (Rickert) atau *Geisteswissenschaften* (Dilthey). Ilmu-ilmu ini berwatak *idiografik* (Windelband). Metode-metode yang digunakan lebih kualitatif. Kalau *Naturwissenschaften* pada

babak terakhir berambisi menemukan *natural laws*, maka *Kulturwissenschaften* atau *Geisteswissenschaften* pada babak terakhir sekadar merumuskan kecenderungan-kecenderungan umum, dengan tetap menjaga keunikan tiap-tiap objek beserta aspek-aspeknya, sehingga pencapaian maksimalnya adalah *general laws*. Itupun masih disertai syarat-syarat kondisional: "Sejauh ini begini, sejauh itu begitu".

Memang, *Naturwissenschaften* dapat menerapkan hukum sebab-akibat secara niscaya terhadap gejala-gejala yang diselidikinya. Setiap benda, sejauh masih dalam ruang atmosfer, tentu akan meluncur ke (arah) bumi atau 'jatuh' apabila tidak ditopang oleh sesuatu yang lain. Sebabnya jelas: gaya tarik bumi (gravitasi). Akibatnya jelas: jatuh! Ini dapat berlaku pada benda apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang demikian itu tidak dapat diberlakukan sedemikian persis terhadap manusia sejauh bukan dilihat dimensi raganya saja. Ambil saja contoh, misalnya, tiga saudara sekandung pada saat yang sama ibu mereka meninggal dunia. Sebabnya sama: ibu kandungnya meninggal. Kesamaan yang lain: mereka sama-sama dilahirkan oleh ibu yang sama. Akan tetapi samakah akibatnya? Belum tentu! Boleh jadi anak yang pertama masih kuat menahan keluarnya air mata dan masih sanggup menemui para pelayat. Anak kedua, ada kemungkinan hanya tercenung dan membisu seribu basa. Dan ada kemungkinan anak ketiga akan meraung-raung histeris dan pingsan berkali-kali. Tentu saja masih terdapat seribu satu kemungkinan yang tidak mudah diprediksi dengan tepat.

Contoh lain barangkali dapat diajukan. Misalnya saja, pada suatu ketika ada tiga orang yang pada saat yang sama sedang beranjak naik bus kota yang sama dari halte yang sama. Akan tetapi samakah sebabnya? Naiknya tiga orang tadi bukan hanya fakta fisik: ada sosok tubuh 'tiga buah' naik ke bus; bukan! Di situ ada makna, ekspresi kejiwaan. Itulah motivasi, tujuan, dan juga kepentingan. Orang pertama mungkin ingin pergi ke kampus untuk mengikuti kuliah. Orang kedua barangkali mau membezuk keluarganya yang sedang diopname di rumah sakit. Dan orang ketiga boleh jadi mencari sasaran untuk dicopet (karena dia pencopet). Tentu saja masih terbuka berbagai-bagai kemungkinan lainnya. Itulah mengapa, *Kulturwissenschaften* atau *Geisteswissenschaften* tidak berpretensi merumuskan *natural laws*. Sebab yang sama belum tentu menimbulkan akibat yang sama, gejala yang tampaknya

sama belum tentu disebabkan oleh sebab yang sama. Hukum sebab-akibat tidak mungkin diterapkan secara mutlak; oleh karenanya, lebih tepat disebut --- meminjam istilah Djojodiguno --- *jalaran jadi temahan*.

Apakah dengan demikian tidak ada atau tertutup kemungkinan bagi perumusan semacam aksioma-aksioma bagi penyelidikan di bidang-bidang kehidupan yang merupakan ekspresi kejiwaan manusia? Di lapangan ekonomi, misalnya, ilmu ekonomi telah 'maju' pesat dengan asumsi-asumsi yang kurang lebih aksiomatik, dan dengan mengoperasikan metode-metode kuantitatif ilmu ekonomi dianggap salah satu ilmu sosial yang dapat diandalkan. Di bidang sosiologi, sejak Comte memproklamirkan 'fisika sosial', kuantifikasi dalam penelitian masalah-masalah sosial dianggap menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang prediktif. Akan tetapi, semua itu bukan tanpa pengkritik. Paruh kedua abad XX hingga kini telah dipenuhi suara-suara alternatif yang pada umumnya ingin mengembalikan manusia sebagai manusia, bukan termanipulasi oleh deretan angka-angka. Demikianlah, misalnya, dalam sosiologi muncul sosiologi humanistik yang salah satu penganjurnya adalah Peter L. Berger. Dalam psikologi kita dapati pula 'perang' antara kelompok Behaviourisme dan Gestalt, belum lagi kehadiran Psikoanalisa yang diintrodusir oleh Sigmund Freud dan di tahun 50-an muncul pula Psikologi Humanistik yang diwartakan oleh Abraham Maslow. Apa arti semua ini? Ini menunjukkan betapa banyaknya kerangka teori untuk melukiskan bidang-bidang kehidupan sebagai ekspresi kejiwaan manusia.

Sistem Pancasila memang tidak menutup kemungkinan bagi kuantifikasi bidang-bidang ini, sejauh pada babak terakhir dimensi humanitas harus menjadi penentu. Oleh karena itu dalam pemetaan ilmu-ilmu dalam refleksi ini dikatakan bahwa dalam hal objek kajiannya fisik-kealaman *lebih kuantitatif*, sedangkan dalam hal objeknya ekspresi kejiwaan manusia dalam berbagai bidang kehidupan *lebih kualitatif*. Itulah mengapa, dalam peta pengelompokan ilmu-ilmu di sini tidak dibedakan, umpamanya, antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keduanya sengaja dimasukkan dalam satu kelompok, dengan 'meminjam' wadah *Kulturwissenschaften* atau lebih luas lagi cakupannya, *Geisteswissenschaften*. Dalam hal metodologi, kelompok ilmu-ilmu ini pada ujung-ujungnya lebih *verstehen*, sedangkan kelompok

ilmu-ilmu yang objek kajiannya bersifat fisik-kealaman ujung-ujungnya lebih *Erklären*.

Pengenalan/Pengetahuan Manusia terhadap Dunia Ilahiah

Kini tiba gilirannya menelusur pengenalan/pengetahuan manusia terhadap dunia ilahiah. Pertama-tama harus disadari bahwa dalam pengenalan ini yang menjadi sasarannya sangat khas, yakni Tuhan. Oleh karena itu pemahaman akan 'objek' ini dimulai dengan kepercayaan/keyakinan. Kalau dalam ilmu-ilmu pada umumnya orang mengerti dulu baru kemudian percaya, di sini sebaliknya: orang musti percaya dulu baru kemudian mengerti (Anselmus: *credo ut intelligam*), dan bahkan hal itu dipercayai justru karena akal tidak mampu menangkapnya (Tertulianus: *credo quia absurdum est*). Memang cukup banyak filsuf maupun teolog yang mencoba memberi berbagai macam argumentasi akan adanya Tuhan, akan tetapi semua argumentasi itu bila dicermati sebenarnya telah dilandasi dengan keyakinan terlebih dahulu. Sebut saja misalnya Thomas Aquinas dengan *Lima Jalan*-nya, Kierkegard dengan gaya eksistensialisnya, dan masih banyak lagi.

Karena bidang ini menyangkut *kepercayaan-keagamaan*, maka pada babak terakhir yang ingin dicapai bukannya *natural laws* ataupun *general laws*, melainkan *absolute laws*. Untuk itu sarana atau metode yang dipergunakan lebih bersifat kontemplatif atau meditatif. Ini harus dibedakan dengan 'ilmu' agama sebagaimana agama-agama mengajarkan ajarannya. Juga harus dibedakan dengan, umpamanya, sosiologi agama atau fenomenologi agama. Yang mau dikatakan di sini adalah kemungkinan-kemungkinan epistemologis bagi pengenalan akan Tuhan. Upaya ini ditempuh sebagai konsekuensi pengakuan adanya Tuhan (Sila I). (Lihat skema B).

Refleksi Aksiologis

Perdebatan masalah apakah ilmu bebas nilai atau tidak, telah lama berlangsung. Kegiatan keilmuan selalu dalam ketegangan antara *objektivitas* atau *netralitas* ilmu di satu pihak dan *tanggung jawab etis* di lain pihak. Ada lagi yang berpendirian bahwa ilmu itu sendiri netral, ilmu tidak mengenal sifat baik atau buruk, dan si pemilik pengetahuan itulah yang harus bersikap (Jujun Suriasumantri, 1982; 35).

Apakah dengan demikian ilmu benar-benar netral? Lebih lanjut Jujun mengatakan bahwa netralitas ilmu hanya terletak pada dasar epistemologisnya saja, sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai antara yang baik dan yang buruk, yang pada hakikatnya si ilmuwan harus menentukan sikap. Pendirian ini, secara singkat dapat dikatakan bahwa ilmu itu netral, tapi si ilmuwan tidak netral. Apakah pendirian ini tahan uji?

Dalam kegiatan keilmuan, si ilmuwanlah yang memainkan peran sangat menentukan. Ilmu bukanlah sekadar registrasian fakta-fakta. Fakta itu ditentukan, diolah, diinterpretasikan; dan semua itu diputuskan oleh si ilmuwan. Pada tingkat teoritis sekalipun (jadi belum dipraktekkan/digunakan), manusia ilmuwan telah menentukan sikap (lihat Van Melsen, 1985; Bab IV dan V). Namun toh harus disadari pula, bahwa dapat saja terjadi ilmu 'dicemari' ideologi. Tetapi kenyataan menunjukkan, bahwa ilmu pun merupakan hasil struktural dari pengamatan dan penalaran manusiawi dan refleksinya berubah sesuai dengan struktur-struktur dasar suatu kebudayaan. Kalau ini benar, maka pengertian-pengertian seperti 'sifat ilmiah', 'objektivitas', bahkan 'fakta' sekalipun, secara intrinsik turut ditentukan oleh perubahan dalam bentuk kebudayaan (Van Peursen, 1985; 4).

Dengan berbagai pertimbangan tadi, ada satu tesis yang hendak dikemukakan di sini, yakni bahwa setiap sikap dan tindakan manusia -- diakui tegas-tegas atau disembunyikan secara diam-diam -- tentu dilandasi atau dimotivasi oleh seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya, kebaikannya dan keindahannya. Dan bagi ilmuwan, ini pun berlaku, tidak peduli apakah ia masih berkutat dengan tumpukan buku ataukah masih sibuk di laboratorium, ataukah ia telah 'menggunakan' ilmunya. Lantas nilai-nilai apakah yang dapat diberikan oleh Pancasila? Tentu saja sistem nilai yang terkandung di dalam sila-silanya, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan/persatuan, kerakyatan/ demokrasi dan keadilan sosial. Keseluruhan dan kebulatan nilai-nilai itu seakan-akan harus merupakan 'kisi-kisi' dalam diri manusia Indonesia (tentu saja termasuk ilmuwan Indonesia) dalam *menanggapi* kenyataan.

Sikap Manusia terhadap Keberadaan Lain

Sekarang harus disusun skema tanggapan manusia

terhadap jenjang-jenjang realitas sebagaimana telah disusun dalam refleksi ontologis pada pasal terdahulu. Terhadap Tuhan (dunia ilahiah), manusia menunjukkan sikap penghambaan (*worship*). Terhadap sesama manusia (dunia human), manusia harus menunjukkan sikap kasih sayang dan kebersamaan (*togetherness & compassion*) (Bandingkan dengan ajaran Buber: *Ich-Du*, Confucius: *Chung* dan *Shu*, dalam khasanah filsafat India: *Tat Twam Ashi*). Sedangkan terhadap dunia infra-human, lebih-lebih hewan, tanaman dan benda tak-hidup, manusia pantas menunjukkan sikap pemanfaatan (*utilization*). Tetapi harus dicatat, bahwa pemanfaatan itu bukanlah eksploitatifistik, melainkan harus dijiwai kearifan yang mengacu kepada sikap penghambaan kepada Tuhan (bukankah manusia dan alam-dunia termasuk yang infrahuman ciptaan tuhan juga?) dan sikap cinta kasih serta kebersamaan antarsesama (bukankah dunia infrahuman merupakan pemasok bagi kehidupan manusia yang tanpa itu mustahil manusia bisa *survive*, pun pula harus disadari, bahwa yang membutuhkannya bukan hanya sekelompok manusia yang hidup pada tempat dan waktu tertentu saja, melainkan seluruh umat manusia, dari generasi ke generasi). Kiranya nilai-nilai Pancasila, terutama sila I, II, dan V mampu menuntun sikap ini.

Apabila kita urutkan berdasarkan penjenjangan dari 'bawah' ke 'atas' (dunia infrahuman, dunia human, dunia ilahiah), maka orientasi sikap manusia makin batiniah. Sedangkan apabila dari 'atas' ke 'bawah' (dunia ilahiah, dunia human, dunia infrahuman), maka orientasinya makin lahiriah.

Tindakan Manusia terhadap Keberadaan Lain

Sekarang tiba gilirannya untuk berefleksi tentang tindakan manusia terhadap segenap realitas. Terhadap Tuhan/dunia ilahiah, tindakan manusia berupa ketaatan (*obedience*). Dalam 'bahasa' agama pada umumnya, ketaatan atau ketakwaan berarti menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Terhadap sesama manusia, tindakan yang harus diwujudkan adalah kerjasama (*cooperative*). Dalam budaya Indonesia, itu berarti bekerja sama dalam suasana gotong-royong dan saling tolong-menolong. Sedangkan terhadap dunia infrahuman, tindakan yang harus diwujudkan adalah pengelolaan (*management*). Pengelolaan dalam arti yang lengkap, bukan hanya berisi kiat

pemungutan hasil dan kegunaan semata-mata, melainkan sekaligus menjaga dan merawat kelestarian sumber-sumbernya.

Apabila kita urutkan dari 'bawah' ke 'atas' (dunia infrahuman, dunia human, dunia ilahiah), maka tindakan manusia semakin simpatik-empatik. Sedangkan apabila kita urutkan dari 'atas' ke 'bawah' (dunia ilahiah, dunia human, dunia infrahuman), maka tindakan manusia makin bersifat praktis-pragmatis. (Untuk seluruh refleksi aksiologis, lihat skema C).

Wasana Kata

Harus diakui bahwa upaya refleksi ini masih dalam taraf tentatif. Namun sebagai refleksi "awal", telah diusahakan untuk mencoba membuat konstruksi pikiran dalam garis besar. Boleh jadi masih banyak aspek yang belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Terlalu dini untuk mengatakan bahwa hasil karangan singkat ini merupakan refleksi definitif terhadap fungsi Pancasila sebagai orientasi kegiatan keilmuan. Jalan panjang masih harus ditempuh. Diskusi, dialog, perdebatan harus senantiasa diusahakan dalam rangka eksplisitasi fungsi Pancasila, terutama dalam bidang keilmuan. Diperlukan keseriusan dan kearifan untuk *menggarap* lahan itu. Dan, tulisan singkat ini hanyalah sebuah awal dari kesungguhan dan kearifan itu.



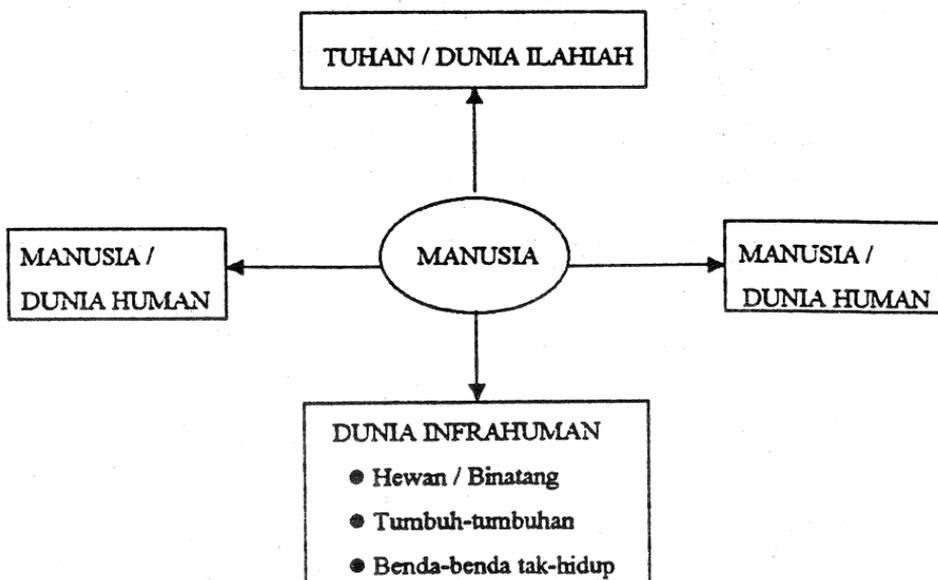
KEPUSTAKAAN

- Bakker, A.H., 1987, "Ilmu-ilmu Sosial yang Menempatkan Manusia sebagai Subjek", dalam Soeroso Prawirohardjo dkk. (eds.), Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu, Yogyakarta, B.P. Kedaulatan Rakyat.
- Habermas, Jurgen, 1990, Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi, Terj. Hassan Basari, Jakarta, LP3ES.
- Jacob, T., 1988, Manusia, Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Jujun S. Suriasumantri, 1982, Ilmu dalam Perspektif, Jakarta, Yayasan Obor dan LEKNAS-LIPI.

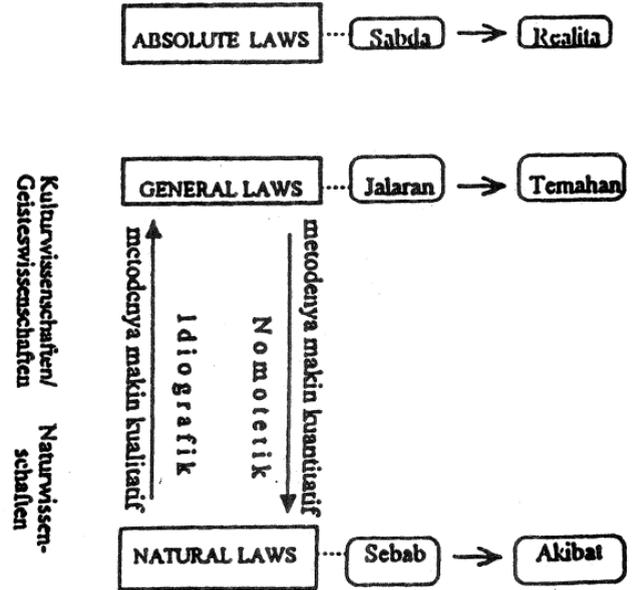
- Koento Wibisono, 1987, "Filsafat Pancasila dan Aliran-Aliran Filsafat", dalam Soeroso Prawirohardjo dkk. (eds.), *Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*, Yogyakarta, Liberty.
- Koento Wibisono, 1986, "Ideologi dan Pengusahaan Ilmu", dalam Slamet Sutrisno (ed.), *Pancasila sebagai Metode*, Yogyakarta, Liberty.
- Mangunwijaya, Y.B., 1985, *Teknologi dan Dampak Kebudayaannya*, Jilid II, Jakarta, Yayasan Obor.
- Notonagoro, 1980, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta, Pantjuran Tudjuh.
- Oetojo Oesman dan Alfian (eds.), 1991, *Pancasila sebagai Ideologi*, Jakarta, BP-7 Pusat.
- Pranarka, A.M.W., 1987, *Epistemologi Dasar*, Jakarta, CSIS.
- Pranarka, A.M.W., 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta, CSIS.
- Soejadi dan Koento Wibisono, 1986, "Aliran-Aliran Filsafat dan Filsafat Pancasila", dalam Slamet Soetrisno (ed.), *Pancasila Sebagai Metode*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjanto Puspwardojo, 1989, *Filsafat Pancasila; Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta, P.T. Gramedia.
- Van Melsen, A.G.M., 1985, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Terj. K. Bertens, Jakarta, P.T. Gramedia.
- Van Peursen, C.A., 1985, *Susunan Ilmu Pengetahuan*, Terj. J. Drost, Jakarta, P.T. Gramedia.

T U H A N
M A N U S I A
B I N A T A N G / H E W A N
T U M B U H - T U M B U H A N
B E N D A - B E N D A T A K - H I D U P

**POLA / TATA HUBUNGAN MANUSIA
DENGAN SEGENAP REALITAS**



SKEMA B
PENGENALAN / PENGETAHUAN MANUSIA TERHADAP REALITAS



SKEMA C
SIKAP DAN TINDAKAN MANUSIA TERHADAP REALITAS

